

PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN YANG DEMOKRATIS DAN HUMANISTIS

*(Refleksi terhadap Paradigma, Proses, dan Produk Pendidikan Sebagai Dasar
Revitalisasi Prinsip dan Nilai Pendidikan di Indonesia)*

Bornok Sinaga

Abstrak

Prinsip dasar pendidikan dan pembelajaran yang demokratis adalah memberi kepercayaan dan kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk mengembangkan potensinya, karakternya, pengetahuannya, keterampilannya, dan kreativitasnya untuk mencapai cita-cita bersama bangsa ini. Pendidikan yang demokratis dalam pengertian luas hendaklah mampu memberdayakan semua kelompok (kelompok budaya, agama, organisasi, anak cacat, kelompok suku terasing, kelompok profesi, masyarakat desa tertinggal dan terpencil) tanpa batas-batas yang spesifik. Pendidikan humanis sebagai pemikiran pendidikan telah berkembang dengan mengadopsi prinsip-prinsip pendidikan dari dua aliran, yaitu progresivisme dan eksistensialisme. Tetapi pendidikan humanis juga memperoleh dukungan dari para ahli psikologi humanistik dan ahli pendidikan kritis.

Kata Kunci : *demokratis, humanis*

PENDAHULUAN

Sistem pendidikan dan pembelajaran yang demokratis dan humanistik adalah sistem pendidikan yang memberikan ruang gerak yang luas dan penghargaan yang tinggi akan keunikan kelompok masyarakat dan keunikan setiap individu peserta didik. Setiap anak dilahirkan dalam sebuah matriks sosial tertentu, memiliki budaya yang berbeda-beda, agama yang berbeda, kecerdasan dan daya adaptasi yang berbeda-beda, serta kondisi fisiologi dan psikologi yang berbeda. Semua kelompok masyarakat (umumnya) dan peserta didik (khususnya) yang berbeda

tersebut perlu dikembangkan dan diberdayakan karakternya, pengetahuannya, keterampilannya, dan kreatifitasnya. Dalam konsep *Inteligensi Multipel* setiap individu memiliki 8 (delapan) kecerdasan mengolah informasi (kecerdasan logical, linguistik, numerikal, musikal, spasial, intra-personal, inter-personal, dan *bodily kinetic*), tetapi hanya ada tepat satu kecerdasan yang dominan di dalam diri setiap individu. Sedangkan Hogan Garcia (2003) memperkenalkan 2 (dua) jenis kemampuan mengolah informasi

Bornok Sinaga adalah Guru Besar Pendidikan Matematika dan Dosen Jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Medan

budaya atau *cultural diversity skills*, yaitu yang meniru mekanisme pengolahan informasi budaya dari lingkungan atau yang diputuskan sendiri oleh seseorang. Dalam sistem pendidikan yang demokratis dan humanistik, berbagai keunikan individu diakomodasi secara manusiawi.

Finlandia adalah salah satu negara yang menerapkan sistem pendidikan yang demokratis dan humanis. Hasil survey internasional PISA pada tahun 2007 yang menempatkan prestasi peserta didik asal Finlandia dengan peringkat terbaik sedunia. Banyak kalangan begitu ingin tahu mengapa negara yang cenderung sangat ‘longgar’ perlakuannya terhadap peserta didik ini dapat meraih peringkat lebih tinggi dalam PISA daripada Korea Selatan yang beban belajar bagi masing-masing peserta didiknya adalah 50 jam per minggu, sangat padat bila dibandingkan dengan Finlandia yang hanya 30 jam per minggu. Terlebih lagi, sistem pendidikan Finlandia tidaklah mengenal Ujian Nasional (UN) sebagaimana Indonesia yang telah

menjadikannya sebagai ritual tahunan. Finlandia juga tidak mengenal adanya sistem ranking, maupun peserta didik yang tinggal kelas, apalagi tidak lulus sekolah, tidak seperti yang terjadi di Indonesia. Jadi Finlandia tidak mengkotak-kotakkan masyarakat pendidikannya. Lebih lugas lagi, tidak ada diskriminasi dalam masyarakat pendidikan yang didasarkan atas tingkat intelektualitas, agama, budaya, kelompok masyarakat, kelompok organisasi, kelompok anak cacat, kelompok suku terasing, dan lainnya. Semua kelompok masyarakat dan individu diberi kepercayaan dan kesempatan yang sama tumbuh dan berkembang demi kepentingan bangsa dan negara.

Bila membandingkan Indonesia dengan negara yang ekonominya sangat maju seperti Finlandia dianggap terlalu berlebihan, maka mengetahui posisi Indonesia dalam Indeks Pembangunan Pendidikan (*Education Development Index*) yang terdapat pada laporan EFA (*Education For All*) yang

Bornok Sinaga adalah Guru Besar Pendidikan Matematika dan Dosen Jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri medan

dipublikasikan dalam *Global Monitoring Report (GMR)* tahun 2011 oleh UNESCO, dan hasil survey *Human Development Report (HDR)* tahun 2011 versi UNDP. Dari 187 negara yang dinilai, Indonesia berada pada rank 124 dengan Indeks Pembangunan Pendidikan (IPP) adalah 0,584, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah 0617. Kedua hasil survey ini membuktikan bahwa peringkat Indonesia memang rendah bahkan bila dibandingkan dengan negara tetangga sekalipun, seperti Malaysia dan Filipina.

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia saat ini, berbagai fenomena sosial terjadi, seperti penindasan Hak Azasi Manusia (HAM), produktivitas dan kreatifitas Sumber Daya Manusia Indonesia rendah, kemiskinan, pengangguran, ketimpangan sosial, lemahnya layanan sektor publik, korupsi, rendahnya kualitas ketaatan terhadap hukum, lemahnya nasionalisme anak bangsa dan berbagai permasalahan sosial lainnya semakin bermunculan dan

frekuensinya cukup tinggi. Sebagian besar fenomena tersebut terjadi akibat dari pola tindak kaum terdidik. Produk pendidikan melahirkan lulusan yang kehilangan karakter (*lost character*) kemanusiaannya. Peserta didik dan lulusan mengalami anomali-anomali dalam adaptasi terhadap perubahan zaman dan tuntutan globalisasi dunia.

Pendidikan dan pembelajaran berbagai bidang ilmu di sekolah saat ini terkesan gersang (kering) dari keindahan hidup, dijejali dengan hafalan teori dan sangat minim praktek, terlalu abstrak, dan kurang menyentuh *value* dan dimensi kemanusiaan dari bidang ilmu yang diajarkan. Seyogianya pendidikan dan pembelajaran sebagai bagian integral dari kebudayaan manusia dan oleh karenanya mempunyai karakteristik yang bersifat humanistik (manusiawi). Pendidikan dan pembelajaran yang demokratis dan humanistik adalah praktek pendidikan dan pembelajaran yang membawa peserta didik nyaman dalam perbedaan (berbeda dalam kecerdasan/potensi, budaya, suku,

Bornok Sinaga adalah Guru Besar Pendidikan Matematika dan Dosen Jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Medan

dan agama), kebebasan berpikir dan berkreasi, berkesempatan mengonstruksi estetika keilmuan, suasana akademik yang kolaboratif dan adaptif terhadap perubahan dengan orientasi pendidikan adalah menghasilkan lulusan yang memiliki *character/soft skills, life skills*, dan *survive* dalam hidup.

Dalam tulisan ini akan dipaparkan suatu ide yang masih terbatas terkait pentingnya

PEMBAHASAN

Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan Di Indonesia Menuntut Pendidikan yang Demokratis dan Humanistik

Prinsip yang dianut dalam penyelenggaraan sistem pendidikan di Indonesia tertuang dalam UU Sisdiknas Tahun 2003, pasal 4 ayat 1 sampai 6. Pada ayat 1 dinyatakan pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Namun pasal-pasal selanjutnya dalam UU Sisdiknas sendiri ternyata memperlakukan peserta didik dengan cara yang sangat diskriminatif, sebagaimana pasal 5 ayat 2 hingga 4,

mengimplementasikan pendidikan yang demokratis dan humanistik di Indonesia dengan berbagai pertimbangan fenomena yang terjadi ditengah-tengah bangsa yang besar ini, dan kenyataannya telah digariskan dalam UU Sisdiknas tahun 2003 pada pasal 4 ayat 1 sampai 6.

yang menyatakan bahwa hanya warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, sosial, atau tinggal di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, serta warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus, yang mekanismenya tidak dipaparkan dengan jelas bahkan tidak tersedia peraturan pemerintah untuk implementasinya. Landasan hukum inilah yang akhirnya menjadi dasar bagi sekolah-sekolah untuk mengadakan kelas unggulan yang

Bornok Sinaga adalah Guru Besar Pendidikan Matematika dan Dosen Jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri medan

berisi peserta didik yang dianggap oleh sekolah memiliki tingkat intelektual yang lebih tinggi dibandingkan dengan peserta didik lainnya. Peserta didik di kelas unggulan biasanya mendapatkan fasilitas lebih, berupa tambahan mata pelajaran intensif dan juga tenaga pendidik dengan kapasitas lebih. Perlakuan khusus yang dapat diterjemahkan sebagai pendidikan khusus ini menimbulkan kecemburuan sosial di antara peserta didik karena persaingan tidak sehat yang diciptakan oleh sekolah. Terlebih lagi kemunculan label sekolah favorit dan sekolah tidak favorit, label SSN dan SBI, yang telah mengkotak-kotakkan level sekolah sehingga juga memunculkan persaingan yang tidak sehat di antara masing-masing sekolah yang tentu saja akan berimplikasi negatif pada peserta didik.

Sebagaimana tergambar dalam prinsip-prinsip penyelenggaraan sistem pendidikan UU Sisdiknas, sebenarnya negara ini memiliki niat menerapkan prinsip pendidikan yang demokratis dan humanistik, tetapi masih sebatas

retorika, belum diwujudkan dalam praktek pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Hal ini dapat dicermati dalam proses pembelajaran, guru lebih cenderung menganut paham behavioristik (dehumanis) dengan prinsip teori tabularasa dari John Locke. John Locke beranggapan bahwa pendidikan adalah penentu masa depan seseorang sebab manusia dilahirkan bagaikan kertas putih yang masih kosong. Tulisan di atas kertas putih yang kosong itulah yang menentukan baik buruknya manusia. Hal ini bertentangan prinsip pembelajaran yang humanis, yang menekankan bahwa sejak lahir manusia sudah membawa potensi dan bakat yang menentukan masa depannya sedangkan pendidikan dan lingkungan hidup/belajar peserta didik adalah pemicu potensi dan bakat yang dimiliki peserta didik menjadi lebih matang.

Pendidikan yang Demokratis dan Humanis

Prinsip dasar pendidikan dan pembelajaran yang demokratis adalah memberi kepercayaan dan kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk mengembangkan

Bornok Sinaga adalah Guru Besar Pendidikan Matematika dan Dosen Jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri medan

potensinya, karakternya, pengetahuannya, keterampilannya, dan kreativitasnya untuk mencapai cita-cita bersama bangsa ini. Pendidikan yang demokratis dalam pengertian luas hendaklah mampu memberdayakan semua kelompok (kelompok budaya, agama, organisasi, anak cacat, kelompok suku terasing, kelompok profesi, masyarakat desa tertinggal dan terpencil) tanpa batas-batas yang spesifik.

Berdasarkan kelompok sasaran tersebut, dapat digambarkan bagaimana variasi pendidikan yang perlu diupayakan. Semua jenis kelompok ini harus dapat diberdayakan dan tidak ada yang disisihkan kalau ingin diciptakan pendidikan yang benar-benar demokratis. Dinamika program pendidikan tidak lain adalah: (1) pendidikan tersebut bersumber pada dan dibangun atas landasan pola kebenaran setempat (lokal, regional, dan nasional), (2) visi dan misi pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan kebutuhan masyarakat yang otonom. Pihak pemerintah, masyarakat, dan

organisasi bisa menyiapkan lembaga pendidikan yang memberi kesempatan pada setiap orang bebas memilih secara adil sesuai keinginannya untuk mengembangkan jati dirinya. Kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan yang lebih luas, yaitu tercapainya cita-cita bersama, sehingga memungkinkan anggotanya untuk lebih berkembang, lebih makmur, dan lebih berbahagia. Jadi dasar demokratisasi tidak lain adalah kepercayaan, pengakuan atas kebebasan manusia dan kesempatan yang diberikan kepadanya untuk berkembang dan keharusan untuk bertanggungjawab bersama dan demi kepentingan bersama (Tilaar, 2002:351).

Sebenarnya konsep *humanizing human through education* telah lama dikemukakan oleh banyak pakar pendidikan humanis sejak berabad-abad lalu. Humanis berasal dari kata *humanus* yang merupakan kata sifat dari *homo* yang berarti manusia. Pendidikan humanis tersebut didefinisikan sebagai keseluruhan unsur dalam pendidikan yang mencerminkan keutuhan manusia dan membantu

agar manusia menjadi lebih manusiawi dengan tiga prinsip yang dikemukakan oleh Mardiatmaja sebagaimana dikutip oleh T. Sarkim (1998), sebagai berikut:

- a. Dalam proses pendidikan, pengembangan hati dan pikiran harus berjalan secara bersama-sama;
- b. Peserta didik harus diberi kesempatan untuk berkenalan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang abadi dan universal;
- c. Dalam pendidikan harus ada kerjasama erat antara peserta didik dan pendidik, juga antara teori dan praktek.

Pembelajaran yang sejalan dengan ketiga prinsip di atas lebih cenderung menganut paham konstruktivisme (khususnya aliran konstruktivis sosial dari Vygotsky). Intinya, pendidikan humanis dapat dipahami sebagai model pendidikan yang memuliakan manusia atas potensi-potensi kemanusiaan yang sudah ada dalam dirinya. Pada model pendidikan ini, manusia dipandang sebagai subyek yang otonom, sehingga pendidikan harus berpusat pada peserta didik dan bukan pada

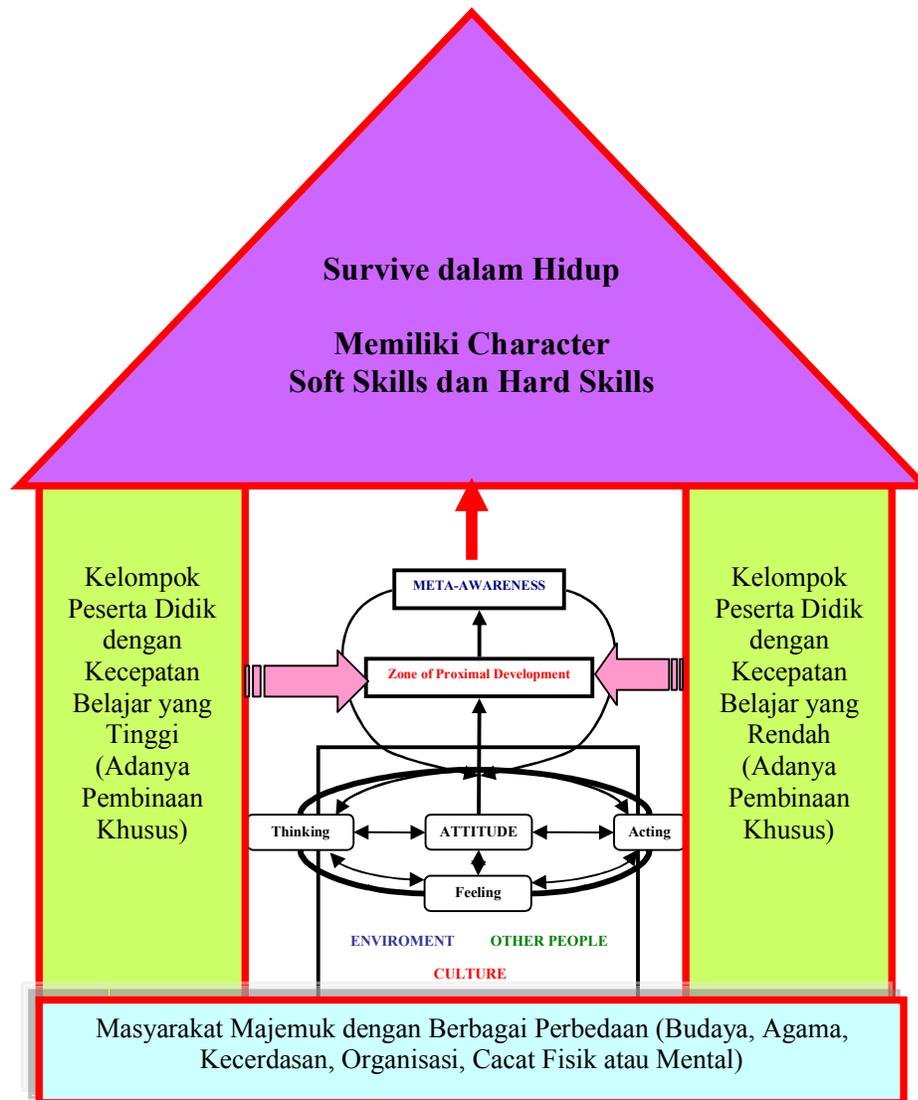
pendidik. Selama tujuan pendidikan adalah untuk mengenalkan peserta didik terhadap realitas yang ada di sekitarnya dan menyadarkan mereka akan proses humanisasi yang terjadi atasnya, maka peserta didik tidak lagi dijejali dengan hapalan teori melainkan dengan membawa mereka pada realitas itu sendiri, melalui integrasi antara teori dengan praktek.

Salah satu jalan untuk dapat menciptakan pendidikan yang demokratis dan humanis adalah pendidikan kewargaan. Pendidikan kewargaan yang paling penting adalah yang menyangkut muatan proses-proses demokrasi, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, partisipasi aktif, dan keterlibatan warga negara dalam masyarakat madani. Hal-hal yang spesifik tercakup dalam pendidikan kewargaan adalah: (1) pemahaman dasar tentang cara kerja demokrasi dan lembaga-lembaga, (2) pemahaman tentang HAM dan pemerintahan berdasarkan hukum, (3) penguatan keterampilan partisipatif agar peserta didik berdaya memecahkan berbagai masalah masyarakat, (4)

pengembangan budaya demokrasi dan perdamaian (Azra, 2002:168).

Implementasi pendidikan dan pembelajaran yang demokratis dan

humanistik di sekolah, mudah-mudahan dapat dipahami melalui skema berikut



Gambar 1: Model Pendidikan yang Demokratis dan Humanis

Dalam pendidikan demokratis dan humanis, tidak ada pengotak-kotakan sekolah dan peserta didik. Peserta didik hanya diklasifikasi atas dua

bagian, yaitu berkemampuan tinggi dan rendah. Bagi peserta didik yang lemah diberi waktu belajar yang cukup melalui proses pembinaan

Bornok Sinaga adalah Guru Besar Pendidikan Matematika dan Dosen Jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri medan

husus, sampai mereka dapat dikembalikan belajar bersama dengan temanya yang satu angkatan. Demikian juga bagi peserta didik yang berkemampuan tinggi diberi program pengayaan pada tingkat yang lebih tinggi.

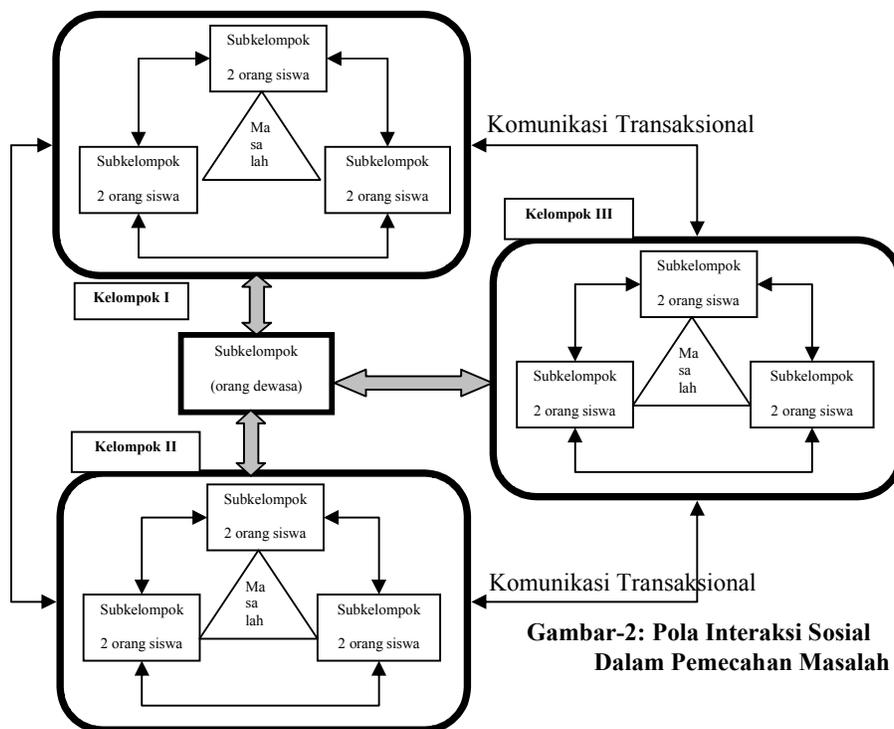
Pendidikan humanis sebagai pemikiran pendidikan telah berkembang dengan mengadopsi prinsip-prinsip pendidikan dari dua aliran, yaitu progresivisme dan eksistensialisme. Tetapi pendidikan humanis juga memperoleh dukungan dari para ahli psikologi humanistik dan ahli pendidikan kritis. Prinsip-prinsip pendidik humanis yang diambil dari prinsip progresivisme adalah prinsip pendidikan yang berpusat pada anak (*child centered*), peran guru yang tidak otoriter, fokus pada keterlibatan dan aktivitas peserta didik, dan aspek pendidikan yang demokratis dan kooperatif. Prinsip-prinsip pendidikan ini adalah sebagai reaksi terhadap pendidikan tradisional yang menekankan pada metode pengajaran formal yang kurang memberi kebebasan pada peserta didik sehingga peserta didik menjadi tidak kreatif yang sekadar

mengikuti program pendidikan yang ditetapkan oleh orang dewasa.

Nenek moyang kita mewariskan nilai kebudayaan yang tinggi, namun proses pewarisan dan implementasi nilai kebudayaan tersebut terasa kering dalam proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Sebagai contoh, Nenek moyang berpesan “putihnya tepung bukan karena besarnya alu tetapi karena adanya gesekan antar butiran beras”. Nilai yang terkandung dari ungkapan tersebut, maksimalnya kemampuan peserta didik, tidaklah semata-mata karena kemampuan guru tetapi dengan adanya interaksi sosial di antara peserta didik. Hal ini sejalan dengan apa yang dinyatakan Vygotsky (Taylor, 1993) bahwa *higher (uniquely human) mental functioning has social origins and “quasi-social” nature. Higher mental functioning is mediated by socio-culturally evolved tools and signs. The signs and symbols of culture influences individual development.* Kutipan ini menuntut para pendidik mengenali karakteristik dan budaya peserta didik. Berdasarkan pengenalan

karakteristik peserta didik, para guru merancang berbagai masalah dari lingkungan budaya peserta didik dan diupayakan berada pada *zone of proximal development*. Pemecahan masalah menjadi bermanfaat bagi peserta didik untuk membawa mereka dari tarap perkembangan aktual menuju perkembangan potensial. Namun kenyataannya dalam proses pembelajaran di

sekolah saat ini, para guru terlalu mendominasi peserta didik dalam pembelajaran, peserta didik kurang dilibatkan dalam berpartisipasi aktif mengonstruksi pengetahuan, berkolaborasi dalam pemecahan masalah, dan guru belum melatih peserta didik secara proaktif dan kreatif untuk mengubah masalah menjadi peluang.



Gambar-2: Pola Interaksi Sosial Dalam Pemecahan Masalah

Prinsip-prinsip pendidikan tradisional yang ditolak humanis adalah (1) guru yang otoriter, (2) metode pengajaran yang

menekankan pada buku teks semata, (3) belajar pasif yang menekankan mengingat data atau informasi yang diberikan guru, (4) pendidikan yang

Bornok Sinaga adalah Guru Besar Pendidikan Matematika dan Dosen Jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri medan

membatasi pada ruang kelas sehingga terasing dari realita kehidupan sosial, (5) penggunaan hukuman fisik atau rasa takut sebagai bentuk pembangun disiplin. Jadi motivasi yang ditanamkan adalah motivasi eksternal, bukan membangun motivasi internal dalam diri peserta didik.

Sekolah demokratis dengan sistem pendidikan yang demokratis itu diharapkan dapat memecahkan masalah-masalah nasional dan lokal dewasa ini. Dalam pembelajaran perlu dilibatkan nilai-nilai budaya luhur, pola interaksi sosial yang dipahami peserta didik di lingkungan budayanya, merancang masalah autentik yang dipecahkan bersama. Hal ini mencerminkan kehidupan keselarasan hubungan-hubungan orang per orang dalam masyarakat, yang dilandasi dengan prinsip-prinsip keadilan dan menghargai etika dan estetika keilmuan. Artikulasi keselarasan dan kerukunan itu akan dapat diwujudkan melalui kerjasama (gotong-royong), sopan santun, norma dan moral, kasih sayang, kekeluargaan, rasa berbakti, dan

lain-lain (Sumjati, 2001:12). Mulal dari sekolah dapat dibentuk pendidikan kewargaan yang berbasis budaya lokal, nasional, bahkan global. Kegiatan strategis yang dapat dikembangkan oleh guru adalah kondisi yang menyebabkan peserta didik betah di sekolah sehingga mereka mau berada di sekolah, senang dan suka bergaul dengan teman, berdiskusi, menyelesaikan tugas-tugas kelompok, membaca, bermain peran, membuat majalah dinding, membuat jurnal metakognisi di sekolah, latihan memecahkan kerumitan bersama, dan lain-lain (Delors, 1999:45; Rosyada, 2002:20).

Dalam ide sekolah demokratis dikemukakan kondisi atau persyaratan yang dikembangkan oleh James A. Beane dan Michael W. Apple sebagai berikut (Rosyada, 2004:16):

- a. Keterbukaan saluran ide dan gagasan, sehingga semua orang bisa menerima informasi seoptimal mungkin.
- b. Memberikan kepercayaan kepada individu-individu dan kelompok dengan kapasitas yang

- mereka miliki untuk menyelesaikan berbagai persoalan sekolah.
- c. Menyampaikan kritik sebagai hasil analisis dalam proses penyampaian evaluasi terhadap ide-ide, problem-problem dan berbagai kebijakan yang dikeluarkan sekolah.
 - d. Memperlihatkan kepedulian terhadap kesejahteraan orang lain dan terhadap persoalan-persoalan publik.
 - e. Mengembangkan kondisi demokratis dalam kehidupan manusia yang dimulai dari anak-anak sekolah dan praktek desain pembelajaran.
 - f. Kepedulian terhadap martabat, harga diri, hak-hak individu, dan hak-hak minoritas.
 - g. Secara institusional sekolah sebagai wadah penerapan dan mempromosikan serta mengembangkan cara-cara hidup demokratis.

Sejalan dengan prinsip-prinsip pendidikan yang telah disebutkan di atas maka para pendidik humanis memiliki

pandangan tentang pendidikan sebagai berikut:

- 1). Tujuan pendidikan dan proses pendidikan berasal dari anak (peserta didik). Oleh karenanya, kurikulum dan tujuan pendidikan menyesuaikan dengan kebutuhan, minat, dan prakarsa anak.
- 2). Peserta didik adalah aktif bukan pasif. Anak memiliki keinginan belajar dan akan melakukan aktivitas belajar apabila mereka tidak difrustrasikan belajarnya oleh orang dewasa atau penguasa yang memaksakan keinginannya.
- 3). Peran guru adalah sebagai fasilitator, motivator, penasihat, pembimbing, mitra belajar bagi peserta didik, bukan penguasa kelas. Tugas guru ialah membelajarkan peserta didik sehingga peserta didik memiliki kemandirian dalam belajar. Guru berperan sebagai pembimbing dan melakukan kegiatan menggali, mengonstruksi dan menemukan pengetahuan bersama peserta didik. Tidak boleh ada pengajaran yang bersifat otoriter, di mana guru

- sebagai penguasa dan murid menyesuaikan.
- 4). Sekolah sebagai bentuk kecil dari masyarakat luas. Pendidikan dan pembelajaran seharusnya fleksibel, dalam arti dapat dilakukan di dalam dan luar kelas, di perpustakaan, di laboratorium, bahkan di tempat sumber masalah yang akan dipecahkan. Pendidikan yang bermakna adalah pendidikan yang berguna bagi peserta didik dan dapat dimanfaatkan dalam kehidupan masyarakat.
 - 5). Aktivitas belajar harus berfokus pada pemecahan masalah autentik, bukan sekadar memindahkan ilmu pengetahuan. Pemecahan masalah adalah bagian dari kegiatan kehidupan. Oleh karenanya, pendidikan harus membangun kemajuan peserta didik untuk memecahkan masalah. Kegiatan pendidikan bukan sebagai pemberian informasi dari guru kepada peserta didik, yang terbatas sebagai aktivitas mengumpulkan dan mengingat kembali pengetahuan statis.
 - 6). Iklim sekolah harus demokratis dan kooperatif karena kehidupan di masyarakat selalu hidup bersama orang lain, maka setiap orang harus mampu berkolaborasi dengan orang lain.
- Dalam realita pendidikan tradisional sering peserta didik dilarang untuk berbicara, berpindah tempat, atau kerja sama dengan peserta didik lain. Iklim demokratis dalam kelas dibutuhkan agar peserta didik dapat hidup secara demokratis di masyarakat. Prinsip-prinsip pendidikan yang humanis diambil dari pandangan progresivisme, yang lebih menekankan bahwa individu sebagai satuan sosial (anggota masyarakat). Sedangkan prinsip pendidikan humanis yang diambil dari pandangan eksistensialisme adalah menekankan pada keunikan peserta didik sebagai individu. Setiap peserta didik dipandang sebagai individu yang memiliki keunikan yang berbeda dengan peserta didik lain. Perbedaan keunikan individu peserta didik dalam kegiatan pendidikan dan pembelajaran harus dapat tampak dan dihargai oleh pendidik atau guru. Pandangan

eksistensial yang diambil oleh pendidik humanis adalah adanya kemerdekaan atau kebebasan dalam diri individu untuk memilih apa yang dianggap benar bagi dirinya untuk dapat membangun dirinya menjadi (*to become*) seperti apa yang diinginkan. Kelahiran sebagai wujud keberadaan (eksistensi) individu di dunia adalah titik awal bagi individu untuk mengembangkan esensi dirinya. Esensi diri manusia dibangun melalui proses kehidupan di mana individu memiliki kebebasan untuk memilih dan dia harus bertanggung jawab terhadap apa yang telah dipilih. Individu akan terbentuk menjadi apa adalah sesuai dengan pilihan bebas yang diambil, yang selanjutnya terbentuk menjadi siapa dirinya, sebagai dokter, insinyur, atau guru adalah sebagai akibat dan pilihan bebas yang dia lakukan. Nilai-nilai keagamaan berada dalam diri individu yang memperoleh pemaknaan oleh individu masing-masing, tidak ada otoritas di luar diri individu yang dapat memberikan makna. Apabila individu melakukan perubahan makna akan pengetahuan, nilai-nilai,

atau keagamaan maka hal itu dilakukan oleh dirinya dengan rasa sukarela dan bukan karena paksaan dan otoritas di luar dirinya. Oleh karenanya, komunikasi atau dialog menjadi instrumen penting bagi perubahan pemaknaan akan pengetahuan, nilai-nilai, maupun keagamaan.

Dalam model pendidikan tradisional, komunikasi atau dialog yang bersifat interaksi dua arah dari guru pada peserta didik, dan peserta didik pada guru, telah diubah menjadi bentuk perintah atau penyampaian informasi yang satu arah. Dalam hal ini, hak-hak peserta didik sebagai individu yang memiliki kebebasan atau otoritas atas dirinya telah dirampas oleh guru. Pengetahuan dan nilai yang ditangkap peserta didik menjadi tidak orisinal atau tidak otentik, tetapi sekadar pengetahuan yang tidak memiliki makna bagi individu dan kehidupannya. Hanya dengan metode dialog maka pengetahuan dan nilai-nilai yang dijadikan materi (isi) dialog tersebut dapat membantu mengubah pengetahuan subjektif menjadi pengetahuan objektif.

Bornok Sinaga adalah Guru Besar Pendidikan Matematika dan Dosen Jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Medan

Dalam metode dialog terjadi proses komunikasi yang setara antara individu satu dengan individu lain, tidak ada unsur pemaksaan sehingga memberi kebebasan bagi setiap individu untuk mengambil atau tidak mengambil pengetahuan dan nilai-nilai. Hal ini juga sesuai dengan prinsip belajar yang disampaikan Carl Rogers, yaitu situasi belajar yang paling efektif meningkatkan belajar yang bermakna adalah apabila (1) situasi yang mengancam diri peserta didik dikurangi seminimal mungkin, (2) perbedaan persepsi terhadap objek pemahaman diizinkan atau difasilitasi.

Paulo Freire menjelaskan dialog adalah sebagai cara yang menusiawi untuk memaknai dunia, dalam arti juga untuk memahami dan memaknai pengetahuan dan nilai-nilai. Dia mengatakan “dialog adalah pertemuan antarorang (manusia), diperantarai oleh dunia, agar memahami (memaknai) dunia”. Apabila ini diterapkan pada situasi belajar maka dialog adalah perjumpaan antara guru dan peserta didik, diperantarai oleh materi (isi)

pelajaran, agar dapat memahami (memaknai) materi pelajaran. Dialog tidak akan terjadi di antara mereka, di mana yang satu merampas hak orang lain (penindas) dan yang lain dirampas haknya (tertindas). Atau dengan bahasa lain bahwa dialog tidak akan terjadi antara guru yang telah merampas hak kebebasan peserta didik dengan peserta didik yang telah dirampas hak kebebasannya oleh guru. Terakhir, Friere mengatakan dialog tidak mungkin terjadi apabila tidak melibatkan berpikir kritis. Manusia dan dunianya sebagai unsur yang tidak terpisahkan, sebagaimana guru dan murid dengan materi pelajaran sebagai unsur yang tidak terpisahkan. Pemahaman atau pemaknaan terhadap dunia atau materi pelajaran dengan tujuan untuk melakukan perubahan kehidupan tidak dapat dilakukan tanpa berpikir kritis. Dalam proses pendidikan atau belajar dengan tujuan untuk perubahan kehidupan maka guru dan peserta didik harus melakukan pemahaman atau pemaknaan dengan menggunakan pemikiran kritis.

PENUTUP

Indonesia telah menggariskan prinsip penyelenggaraan pendidikannya yang demokratis dan humanistik, namun masih sekedar selogan (bersifat retorik) dalam UU Sisdiknas. Prinsip pendidikan dan pembelajaran yang demokratis dan humanis belum tampak diwujudkan praktek pengelolaan pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Pengelolaan pendidikan kita masih membeda-bedakan kelompok masyarakat, organisasi, budaya, agama, dan pembelajarannya masih menganut prinsip behavioristik yang sangat *dehumanis* dalam sistem pendidikannya. Namun bila penyelenggaraan sistem pendidikan di Indonesia mau lebih banyak belajar dari sistem pendidikan negara-negara yang telah menerapkan pendidikan dan pembelajaran yang demokratis dan humanis, bukannya tidak mungkin lambat laun Indonesia yang kaya dengan potensi SDM, budaya dan SDA ini dapat segera bangkit dari krisis yang sedang melanda negeri ini.

Untuk mewujudkan sistem pendidikan yang demokratis dan humanistik, pemerintah dan sekolah mengharuskan tenaga edukatif hijrah dari paradigma guru mengajar (behavioristik) menuju paradigma siswa belajar (konstruktivistik). Pembinaan dan pelatihan guru-guru perlu dilakukan dalam implementasi paradigma baru pembelajaran yang mengapresiasi nilai estetika keilmuan. Seluruh sistem pendukung pendidikan dan pembelajaran harus dibenahi, seperti implementasi berbagai model pembelajaran inovatif yang berbasis pada pendidikan kewargaan, pembelajaran multikultural, muatan laboratorium yang memadai, pembelajaran yang fleksibel (tidak harus di kelas),

Implementasi desentralisasi pendidikan dalam konteks sistem pendidikan yang demokratis dan humanis, otonomi pengelolaan pendidikan melalui pengelolaan berbasis kompetensi akan dapat berjalan dengan baik jika perangkat-perangkat pendukungnya seperti dewan pendidikan daerah dan komite sekolah dapat menjalankan fungsinya

dengan baik. Dalam arti membantu pengembangan pendidikan umumnya dan sekolah khususnya. Melalui dewan pendidikan dan komite sekolah, partisipasi masyarakat di bidang pendidikan dapat diwujudkan. Namun sebaliknya sekolah harus pula membuka diri dan bekerjasama dengan institusi-institusi masyarakat di lingkungan dalam upaya memberdayakan dan

bekerjasama dengan masyarakat termasuk dalam penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat. Diharapkan dengan itu akan terbentuk komunitas yang belajar, organisasi sekolah yang juga belajar dan akhirnya akan terbentuk masyarakat madani yang berbasis pengetahuan (knowledge-based society).

DAFTAR PUSTAKA

- Daniel Mohammad Rosyi. 2008. *Keaduhan Nasional*. Diakses dari <http://jawabali.com/blog/keaduhan-nasional-790/trackback> pada tanggal 25 April 2008.
- Delors, J. 1996. *Four Pillars of Learning*. <http://www.unesco.org/delors/delors> November 25, 2007.
- Gardner, H. 1993. *Frames of Mind: The theory of multiple intelligences*. N.Y.: Basic Books.
- Gardner, H. 2004. *Changing Minds*. Boston, MA: Harvard Business School Press.
- Gardner, H. 2006. *Five Minds for the Future*. Boston, MA: Harvard Business School Press.
- Hogan-Garcia, M. 2003. *The Four Skills of Cultural Diversity Competence: a Process for Understanding and Practice*. Pacific Grove, CA.: Brooks/Cole.
- Joyce, Bruce R., Weill. 1992. *Model of Teaching (fourth Edition)*. Boston-London-Toronto-Sydney-Singapore: Allyn and Bacon Publishers.
- Pai, Young. 1990. *Cultural Foundations of Education*. New York: Macmillan Publishing Company.
- Rosyada, Dede. 2004. *Paradigma Pendidikan Demokratis*. Jakarta: Prenada Media.
- Raka Joni, T. 2008a. *Changing Parenting Styles: Nurturing Cultural Diversity Competence in Indonesia*. Makalah disajikan dalam Kongres ke-5 Asosiasi Psikoterapis se-Asia Pasifik, tanggal 5 - 7 April 2008, di Jakarta.

Bornok Sinaga adalah Guru Besar Pendidikan Matematika dan Dosen Jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri medan

- Salla Korpela. 2005. *Free Schooling for All: The Finnish School System Supports Life Long Learning*. Diakses dari <http://virtual.finland.fi/netcom/m/news/showarticle.asp?intNWSAID=25819> pada tanggal 16 Maret 2008.
- Sarkim, T. 1998. *Humaniora Dalam Pendidikan Sains. Dalam Pendidikan Sains yang Humanistik: Persembahan 72 Tahun Pater JIGM. Drost, SJ*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma dan Penerbit Kanisius. Halaman 128-129.
- Sumjati, As. 2001. *Manus dan Dinamika Budaya*. Yogyakarta: BIGRAF.
- Taylor, Lyn. 1993. *Vygotskian Scientific Concepts: Implications for Mathematics Education*. Focus on learning problems in mathematics Vol. 15, 2-3.
- Tilaar, H. A. R. 2000 *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*. Jakarta:PT Rineka Cipta.
- Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia. (2003). *Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Kemendiknas.